



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2008 NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 27 dan
Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa, maka perlu mengatur ketentuan
mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, perlu dibentuk Peraturan
Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan peraturan perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah, Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Administrasi Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- f. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- h. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintahan dan dan Pemerintah Daerah;
- i. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa;

BAB II
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PEERANGKAT DESA DAN BPD

Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

- (1) Kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. Menetapkan bendahara desa;
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pencatatan penerimaan desa;
 - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Bagian Kedua
Hak Keuangan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (2) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Jenis penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa dengan rincian jenis penghasilan sebagai berikut:

- a. Gaji Pokok ;
- b. Tunjangan Jabatan;
- c. Tunjangan Keluarga
- d. Tunjangan Beras.

Pasal 5

Kepala Desa yang melakukan perjalanan dinas ke luar desa diberikan biaya perjalanan dinas yang diperhitungkan sesuai standarisasi perjalanan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pada akhir masa jabatan, Kepala Desa berhak diberikan uang penghargaan yang bersumber dari
 - a. APB Desa ;
 - b. APBD Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besarnya uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa, khusus pada tahun anggaran yang bertepatan dengan tahun akhir masa jabatan Kepala Desa bersangkutan.

Pasal 7

Jenis penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pasal 4 diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Desa bersangkutan

Pasal 8

- (1) Apabila kepala desa mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sehingga berakibat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan atau kewajibannya, diberi uang tunjangan kecelakaan sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterima setiap bulan yang danannya berasal dari APB Desa;
- (2) Apabila kepala desa meninggal dunia didalam dan sewaktu menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebesar penghasilan yang diterima setiap bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia yang berasal dari APB Desa;
- (3) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan paling sedikit sama dengan UMK sesuai dengan Kemampuan keuangan desa, kecuali sekretaris desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan terhitung sejak tanggal pengangkatan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Jenis penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa dengan rincian jenis penghasilan sebagai berikut :
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Jabatan;
 - c. Tunjangan Keluarga;
 - d. Tunjangan Beras.
- (4) Perangkat Desa Non PNS yang berhenti dengan hormat dan/atau purna bhakti dapat diberikan uang penghargaan sesuai kemampuan keuangan desa.

**Bagian Keempat
BPD**

Pasal 10

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh sekretaris BPD.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

**Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD**

Pasal 11

- (1) Jumlah atau besarnya masing-masing jenis penghasilan tetap serta jenis tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5, 7, 8 dan pasal 9 (sesuaikan) ditetapkan bersama Kepala Desa dengan BPD setiap tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan hak keuangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD ditetapkan dalam APB Desa setiap tahun.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pengelolaan Keuangan Desa adalah masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember,

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Disahkan di Mamuju
Pada tanggal 11 Agustus 2008

BUPATI MAMUJU

Cap/Ttd

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
Pada Tanggal 11 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Cap / Ttd

Drs. H. HABSI WAHID, MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2008 NOMOR 6**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Untuk Mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata di daerah, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini memberikan suatu landasan hukum yang kuat dan pasti mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Pesa dan Perangkat Desa sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembinaan dan pengembangan Desa di daerah seanjutnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Tunjangan keluarga terdiri dari 1 (satu) orang isteri sebesar 10 % (sepuluh Perseratus) dari gaji pokok dan 2 (dua) orang anak sebesar 2 % (dua perseratus) setiap anak
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Tunjangan keluarpa terdiri dari 1 (satu) orang isteri sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok dan 2 (dua) orang anak sebesar 2 % (dua perseratus) setiap anak
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasai 13	: Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2008 NOMOR 6**